



ANALISIS IMPLEMENTASI KOLABORASI PENTA HELIX DALAM PENANGANAN STUNTING

Ferdian Rinaldi¹, Farhan Wahyudi², Afrijal³

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Universitas Syiah Kuala

rinaldiferdian620@gmail.com, farhanwahyudii0123@gmail.com, afrijal@usk.ac.id

ABSTRAK

Stunting masih menjadi salah satu permasalahan pembangunan manusia di Indonesia karena berdampak terhadap kualitas kesehatan, kemampuan kognitif, produktivitas, dan daya saing generasi masa depan. Kompleksitas faktor penyebab stunting menuntut keterlibatan berbagai pemangku kepentingan sehingga diperlukan pendekatan kolaboratif yang mampu mengintegrasikan sumber daya dan peran antaraktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kolaborasi penta helix dalam penanganan stunting di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review dengan pendekatan kajian teoritis. Data diperoleh dari berbagai artikel ilmiah, hasil penelitian, dan publikasi akademik yang relevan mengenai stunting, collaborative governance, dan penta helix. Analisis dilakukan melalui identifikasi, seleksi, serta sintesis literatur untuk memperoleh gambaran mengenai peran aktor, bentuk kolaborasi, dan tantangan implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi penta helix berkontribusi dalam memperkuat upaya penanganan stunting melalui sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media. Pemerintah berperan sebagai koordinator kebijakan, akademisi menyediakan dukungan berbasis pengetahuan, dunia usaha berkontribusi melalui sumber daya dan program sosial, komunitas mendorong partisipasi masyarakat, sedangkan media berfungsi dalam edukasi dan penyebaran informasi. Tantangan yang masih dihadapi meliputi koordinasi lintas sektor, ketimpangan keterlibatan aktor, keterbatasan komunikasi, dan keberlanjutan kolaborasi. Penguatan sinergi antaraktor menjadi faktor penting dalam mendukung percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Kata Kunci: stunting; penta helix; kolaborasi; collaborative governance; pembangunan manusia.

ABSTRACT

Stunting remains a major challenge in human development in Indonesia because it affects physical growth, cognitive development, productivity, and the quality of future human resources. The multifactorial nature of stunting requires comprehensive handling involving various stakeholders rather than relying solely on government intervention. This study aims to analyze the implementation of penta helix collaboration in stunting management in Indonesia. The research employed a literature review method using a theoretical approach. Data were collected from scientific journals, research articles, and academic publications discussing stunting, collaborative governance, and the penta helix model. The collected literature was analyzed through identification, selection, classification, and synthesis processes to obtain a comprehensive understanding of stakeholder roles, collaborative practices, and implementation challenges. The findings reveal that penta helix collaboration contributes to strengthening stunting reduction efforts through the involvement of government, academia, business sectors, communities, and media. The government acts as a policymaker and coordinator, academia provides scientific evidence and recommendations, business sectors contribute resources and social responsibility programs, communities support public participation, and the media facilitates information dissemination and public awareness. Challenges identified include limited cross-sector coordination, unequal stakeholder participation, communication barriers, and the sustainability of collaborative initiatives. Strengthening synergy among stakeholders is essential to enhance the effectiveness of stunting reduction programs and support the improvement of human resource quality in Indonesia.

Keywords: stunting; penta helix; collaboration; collaborative governance; human development.

Pendahuluan

Pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu agenda utama yang menentukan arah kemajuan suatu negara. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, atau kemajuan infrastruktur, tetapi juga ditentukan oleh kualitas manusia yang mampu berpartisipasi secara aktif dalam berbagai sektor kehidupan. Sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan nasional yang berkelanjutan. Perhatian terhadap pembangunan manusia semakin menguat ketika berbagai negara menghadapi tantangan kesehatan masyarakat yang berdampak langsung terhadap kualitas generasi masa depan. Kondisi kesehatan sejak usia dini menjadi faktor yang memengaruhi kemampuan individu dalam memperoleh pendidikan, mengembangkan keterampilan, serta berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi (Akollo et al., 2026).

Salah satu permasalahan kesehatan yang masih menjadi perhatian serius di berbagai negara adalah stunting. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh yang dialami anak akibat kekurangan gizi kronis dalam periode yang relatif panjang, terutama sejak masa kehamilan hingga awal kehidupan anak. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya terlihat pada pertumbuhan fisik yang terhambat, tetapi juga memengaruhi perkembangan kognitif, kemampuan belajar, produktivitas kerja, dan kualitas hidup pada masa dewasa. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang mengalami stunting memiliki risiko lebih tinggi mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran serta berpotensi menghadapi keterbatasan produktivitas ketika memasuki usia kerja. Keadaan tersebut menjadikan stunting bukan sekadar persoalan kesehatan, melainkan juga persoalan pembangunan manusia yang memerlukan perhatian lintas sektor (Catarina & Afriyanti, 2024).

Indonesia termasuk salah satu negara yang menempatkan penanganan stunting sebagai prioritas pembangunan nasional. Upaya percepatan penurunan stunting telah menjadi bagian dari agenda strategis pemerintah yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Berbagai program intervensi telah dilaksanakan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, memperbaiki layanan kesehatan ibu dan anak, memperluas akses sanitasi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi sejak dini. Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya penurunan angka prevalensi stunting dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, jumlah kasus yang masih ditemukan di berbagai wilayah

menunjukkan bahwa persoalan stunting belum sepenuhnya dapat diselesaikan melalui pendekatan yang selama ini diterapkan (Driatama, 2024).

Karakteristik permasalahan stunting menunjukkan adanya keterkaitan antara berbagai faktor yang saling memengaruhi. Kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan orang tua, akses terhadap layanan kesehatan, ketersediaan air bersih, kualitas sanitasi lingkungan, pola asuh anak, hingga budaya masyarakat merupakan faktor-faktor yang memiliki hubungan dengan terjadinya stunting. Keberagaman faktor penyebab tersebut memperlihatkan bahwa stunting tidak dapat dipahami sebagai persoalan yang berdiri sendiri. Upaya penanganannya memerlukan keterlibatan berbagai sektor yang memiliki kapasitas dan sumber daya berbeda. Setiap faktor yang berkontribusi terhadap stunting membutuhkan bentuk intervensi yang berbeda pula sehingga diperlukan sinergi antarpihak untuk mencapai hasil yang lebih optimal (Febriana & Hertati, 2023).

Pendekatan yang hanya mengandalkan peran pemerintah sering kali menghadapi berbagai keterbatasan dalam pelaksanaannya. Kompleksitas persoalan yang dihadapi membuat pemerintah memerlukan dukungan dari berbagai aktor di luar struktur birokrasi. Keterbatasan sumber daya, jangkauan program, kapasitas kelembagaan, serta dinamika sosial masyarakat menjadi tantangan yang tidak mudah diatasi oleh satu institusi saja. Program penanganan stunting yang berjalan secara parsial berpotensi menghasilkan capaian yang kurang maksimal karena setiap sektor bekerja berdasarkan kepentingan dan target masing-masing. Situasi tersebut menunjukkan pentingnya membangun pola kerja yang mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam satu tujuan bersama, yaitu menurunkan angka stunting secara berkelanjutan (Harahap & Yanti, 2025).

Perkembangan paradigma administrasi publik menunjukkan adanya pergeseran dari model pemerintahan yang bersifat hierarkis menuju pola pengelolaan yang lebih kolaboratif. Pemerintah tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya aktor yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan publik. Kehadiran aktor nonpemerintah semakin diakui sebagai bagian penting dalam proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan. Kolaborasi menjadi pendekatan yang banyak digunakan dalam menghadapi permasalahan yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi. Melalui kolaborasi, berbagai pihak dapat menyatukan sumber daya, pengetahuan, jaringan, dan pengalaman untuk menghasilkan solusi yang lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan yang dilakukan secara terpisah (Irawan et al., 2023).

Salah satu bentuk kolaborasi yang banyak digunakan dalam pembangunan saat ini adalah model penta helix. Model ini menekankan keterlibatan lima unsur utama yang terdiri atas pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas atau masyarakat, serta media. Masing-masing aktor memiliki fungsi dan kontribusi yang berbeda dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, akademisi berkontribusi melalui penelitian dan pengembangan pengetahuan, dunia usaha memberikan dukungan sumber daya serta inovasi, masyarakat berperan sebagai subjek sekaligus mitra pembangunan, sedangkan media berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi dan edukasi publik. Sinergi yang terbangun melalui model penta helix dinilai mampu menciptakan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menghadapi berbagai persoalan sosial (Kusuma et al., 2024).

Penerapan kolaborasi penta helix dalam penanganan stunting memiliki relevansi yang kuat mengingat karakteristik permasalahan stunting yang melibatkan banyak faktor penyebab. Pemerintah memerlukan dukungan akademisi dalam menghasilkan rekomendasi berbasis penelitian, dunia usaha dapat memberikan kontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, masyarakat berperan dalam mendukung perubahan perilaku kesehatan, sedangkan media memiliki kemampuan untuk memperluas jangkauan informasi kepada publik. Keterlibatan seluruh aktor tersebut membuka peluang terbentuknya koordinasi yang lebih baik dalam pelaksanaan program penanganan stunting. Hubungan yang saling mendukung antarpemangku kepentingan berpotensi meningkatkan efektivitas intervensi yang dilakukan di lapangan (Melia, 2023).

Meskipun konsep penta helix menawarkan berbagai keunggulan dalam pembangunan kolaboratif, implementasinya tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Perbedaan kepentingan antaraktor, keterbatasan koordinasi, rendahnya komitmen kelembagaan, ketidakseimbangan kapasitas sumber daya, serta lemahnya mekanisme komunikasi sering menjadi hambatan dalam proses kolaborasi. Kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas program yang dijalankan dan mengurangi peluang tercapainya tujuan bersama. Berbagai program penanganan stunting yang melibatkan banyak pihak juga menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi kerja sama dan memastikan seluruh aktor menjalankan perannya secara optimal. Situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah aktor yang terlibat, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas hubungan yang terbangun di antara mereka.

Kajian mengenai implementasi kolaborasi penta helix dalam penanganan stunting menjadi penting untuk memahami bagaimana interaksi antaraktor berlangsung dalam praktik

penyelenggaraan program. Analisis terhadap bentuk kerja sama, peran masing-masing aktor, mekanisme koordinasi, serta berbagai hambatan yang muncul dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas model kolaborasi yang diterapkan. Pengetahuan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi para pemangku kepentingan dalam memperkuat sinergi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program penanganan stunting. Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi kolaborasi penta helix dalam penanganan stunting guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika kolaborasi yang terjadi serta kontribusinya dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia (Nurlatif & Priharwanti, 2019).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian teoritis dengan metode literature review untuk menganalisis implementasi kolaborasi penta helix dalam penanganan stunting di Indonesia. Kajian dilakukan melalui penelusuran dan pengumpulan berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan tema penelitian, meliputi konsep penta helix, collaborative governance, kemitraan multipihak, serta kebijakan dan program penanganan stunting. Sumber data diperoleh dari artikel jurnal nasional dan internasional, prosiding ilmiah, buku akademik, laporan lembaga pemerintah, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting. Proses pencarian literatur dilakukan secara sistematis melalui beberapa basis data ilmiah seperti Google Scholar, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Science and Technology Index (SINTA), Garuda (Garba Rujukan Digital), Crossref, Neliti, ResearchGate, serta portal jurnal perguruan tinggi yang menyediakan akses terbuka terhadap publikasi ilmiah.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) terhadap berbagai sumber literatur yang telah diseleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian. Tahapan kajian meliputi identifikasi literatur, seleksi artikel berdasarkan kesesuaian topik, pengelompokan informasi, interpretasi temuan, serta sintesis hasil kajian untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai implementasi kolaborasi penta helix dalam penanganan stunting. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari publikasi ilmiah yang terbit dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir guna memperoleh informasi yang aktual dan sesuai dengan perkembangan kebijakan serta praktik penanganan stunting. Hasil analisis kemudian digunakan untuk mengidentifikasi peran masing-masing aktor penta helix, bentuk kolaborasi yang terbentuk, faktor pendukung dan penghambat implementasi, serta peluang penguatan kolaborasi dalam upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil penelitian ini diperoleh melalui analisis dan sintesis berbagai literatur yang membahas implementasi kolaborasi penta helix dalam penanganan stunting. Literatur yang dikaji berasal dari artikel jurnal, hasil penelitian, laporan kebijakan, dan publikasi ilmiah yang membahas keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penurunan stunting. Hasil kajian menunjukkan bahwa penanganan stunting tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab sektor kesehatan semata, melainkan melibatkan kerja sama lintas sektor yang mencakup pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media. Keterlibatan berbagai aktor tersebut membentuk pola kolaborasi yang bertujuan mengintegrasikan sumber daya, pengetahuan, serta kapasitas kelembagaan untuk mendukung pencapaian target penurunan stunting (Oktaviyanti et al., 2024)

Analisis terhadap berbagai penelitian terdahulu memperlihatkan adanya sejumlah temuan yang relatif konsisten mengenai implementasi kolaborasi penta helix dalam penanganan stunting. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program penanganan stunting dipengaruhi oleh tingkat sinergi antaraktor, kejelasan pembagian peran, serta efektivitas koordinasi yang dibangun selama proses pelaksanaan program. Kajian ini mengidentifikasi tiga temuan utama yang menjadi fokus pembahasan, yaitu kontribusi kolaborasi penta helix terhadap efektivitas penanganan stunting, peran dan keterlibatan masing-masing aktor penta helix dalam pelaksanaan program, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi kolaborasi penta helix pada upaya percepatan penurunan stunting (Pardosi & Bratakusumah, 2024).

1. Kontribusi Kolaborasi Penta Helix dalam Penanganan Stunting

Penanganan stunting merupakan pekerjaan yang melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga membutuhkan keterlibatan lebih dari satu aktor pembangunan. Berbagai program penurunan stunting menunjukkan bahwa pendekatan yang hanya bertumpu pada sektor kesehatan sering kali belum mampu menjangkau seluruh faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya stunting. Persoalan gizi, sanitasi, pendidikan keluarga, kondisi ekonomi rumah tangga, serta akses terhadap layanan dasar saling berkaitan dan membentuk permasalahan yang kompleks. Kondisi tersebut mendorong munculnya kebutuhan akan pola kerja yang mampu menghubungkan berbagai pemangku kepentingan dalam satu tujuan yang sama. Kolaborasi penta helix hadir

sebagai pendekatan yang memungkinkan terjadinya integrasi sumber daya, pengetahuan, dan kapasitas kelembagaan untuk memperkuat upaya penanganan stunting secara lebih menyeluruh.

Kontribusi utama kolaborasi penta helix terlihat pada kemampuannya membangun sinergi antaraktor yang sebelumnya bekerja secara terpisah. Pemerintah memiliki kewenangan dalam penyusunan kebijakan dan penyediaan layanan publik, sementara akademisi berperan menghasilkan kajian ilmiah yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dunia usaha memberikan dukungan melalui pemanfaatan sumber daya dan program tanggung jawab sosial, sedangkan komunitas berperan dalam menjangkau masyarakat secara langsung melalui berbagai kegiatan pemberdayaan. Media melengkapi proses tersebut dengan menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya pencegahan stunting. Hubungan yang saling melengkapi antaraktor tersebut menciptakan ruang kerja sama yang lebih luas dibandingkan pendekatan sektoral yang selama ini banyak digunakan (Purnomo et al., 2023).

Keberadaan kolaborasi penta helix juga berkontribusi dalam memperkuat efektivitas pelaksanaan program di lapangan. Keterlibatan berbagai pihak memungkinkan tersedianya dukungan yang lebih beragam, baik dalam bentuk pendanaan, tenaga, informasi, maupun inovasi program. Berbagai kegiatan seperti edukasi gizi, pendampingan keluarga berisiko stunting, peningkatan kualitas sanitasi lingkungan, dan kampanye kesehatan masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih terkoordinasi ketika setiap aktor menjalankan perannya sesuai kapasitas masing-masing. Kehadiran banyak pihak dalam satu kerangka kolaborasi juga membuka peluang terjadinya pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang dapat meningkatkan kualitas intervensi yang diberikan kepada masyarakat.

Kontribusi lain yang muncul dari penerapan kolaborasi penta helix adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program penanganan stunting. Masyarakat tidak lagi ditempatkan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai bagian yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Keterlibatan masyarakat menjadi penting karena perubahan perilaku hidup sehat tidak dapat dicapai hanya melalui instruksi dari pemerintah. Kesadaran mengenai pemenuhan gizi anak, pola asuh, pemanfaatan layanan kesehatan, serta kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan lebih mudah tumbuh ketika masyarakat merasa memiliki program yang dijalankan. Situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan stunting sangat dipengaruhi oleh kemampuan kolaborasi dalam membangun rasa tanggung jawab bersama di antara para pemangku kepentingan (Saepudin et al., 2025).

Hasil berbagai kajian menunjukkan bahwa kolaborasi penta helix memberikan nilai tambah dalam upaya percepatan penurunan stunting karena mampu menghubungkan kepentingan, sumber daya, dan kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing aktor. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat koordinasi program, tetapi juga memperluas jangkauan intervensi yang diberikan kepada masyarakat. Kolaborasi yang berjalan secara konsisten berpotensi menghasilkan program yang lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal serta mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul selama pelaksanaan. Keberhasilan penanganan stunting pada akhirnya tidak hanya bergantung pada besarnya sumber daya yang tersedia, melainkan juga pada kemampuan para aktor untuk bekerja secara bersama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Peran dan Keterlibatan Aktor Penta Helix

Implementasi kolaborasi penta helix dalam penanganan stunting memperlihatkan bahwa setiap aktor memiliki fungsi yang berbeda sekaligus saling berkaitan. Pemerintah menempati posisi sentral sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penyusunan kebijakan, pengalokasian anggaran, koordinasi program, serta pengawasan pelaksanaan kegiatan. Melalui berbagai regulasi dan program percepatan penurunan stunting, pemerintah berupaya membangun keselarasan tindakan antara pemerintah pusat dan daerah agar intervensi yang diberikan dapat menjangkau kelompok sasaran secara lebih efektif. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada penyediaan layanan kesehatan, tetapi juga mencakup penguatan sanitasi, penyediaan air bersih, perlindungan sosial, hingga peningkatan kapasitas kelembagaan yang terlibat dalam penanganan stunting. Keterlibatan pemerintah menjadi fondasi yang memungkinkan seluruh aktor lain dapat berpartisipasi dalam kerangka kerja yang terarah dan memiliki tujuan yang sama (Sahara et al., 2025).

Kalangan akademisi hadir melalui kontribusi keilmuan yang mendukung proses pengambilan keputusan berbasis bukti. Berbagai penelitian mengenai faktor penyebab stunting, efektivitas program intervensi, pola konsumsi masyarakat, maupun evaluasi kebijakan memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan strategi penanganan yang lebih tepat sasaran. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian juga berperan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, penyuluhan kesehatan, pelatihan kader, serta pendampingan program di tingkat lokal. Pengetahuan yang dihasilkan akademisi membantu mengurangi kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan yang diterapkan. Kehadiran unsur akademik menjadikan proses penanganan stunting tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan

program, tetapi juga pada pengembangan inovasi dan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil kajian ilmiah (Toana & Rowa, 2024).

Dunia usaha memberikan kontribusi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung berbagai kegiatan penanganan stunting. Keterlibatan sektor swasta umumnya diwujudkan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan yang menasar peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Bentuk dukungan yang diberikan dapat berupa bantuan makanan tambahan, penyediaan sarana sanitasi, dukungan pendanaan kegiatan edukasi kesehatan, maupun kerja sama dalam pemberdayaan ekonomi keluarga. Partisipasi sektor bisnis memperluas kapasitas program yang dijalankan karena pemerintah tidak harus bekerja sendiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kehadiran sektor swasta juga membuka peluang lahirnya inovasi dalam pelaksanaan program melalui pemanfaatan teknologi, sistem informasi, dan pendekatan manajemen yang lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan di lapangan.

Komunitas dan media menjadi dua aktor yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran program. Komunitas berperan dalam membangun partisipasi warga, menggerakkan kader kesehatan, mendampingi keluarga berisiko stunting, serta membantu penyebaran informasi di tingkat lokal. Aktivitas tersebut memudahkan program pemerintah menjangkau masyarakat hingga lapisan paling bawah. Media mendukung proses tersebut melalui penyebarluasan informasi, kampanye edukatif, publikasi program, serta pembentukan opini publik mengenai pentingnya pencegahan stunting sejak dini. Informasi yang disampaikan secara berkelanjutan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai gizi, pola asuh, dan perilaku hidup sehat. Keterlibatan komunitas dan media menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan stunting tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan sumber daya, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan membangun kesadaran kolektif yang mendorong perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan.

3. Tantangan Implementasi Kolaborasi Penta Helix dalam Penanganan Stunting

Implementasi kolaborasi penta helix dalam penanganan stunting melibatkan berbagai aktor yang memiliki latar belakang, kepentingan, serta kapasitas yang berbeda. Keberagaman tersebut menjadi kekuatan dalam mendukung pelaksanaan program, tetapi pada saat yang sama juga menghadirkan berbagai tantangan yang perlu dikelola secara efektif. Hasil kajian dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah aktor yang terlibat, melainkan juga dipengaruhi oleh kualitas koordinasi, komunikasi,

pembagian peran, serta komitmen bersama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketika salah satu unsur tersebut tidak berjalan secara optimal, efektivitas program penanganan stunting dapat mengalami hambatan.

Berbagai studi mengenai collaborative governance dan implementasi penta helix dalam penanganan stunting menunjukkan adanya sejumlah tantangan yang relatif serupa di berbagai daerah. Hambatan tersebut meliputi koordinasi lintas sektor yang belum maksimal, keterbatasan komunikasi antaraktor, ketimpangan tingkat partisipasi pemangku kepentingan, hingga keberlanjutan program yang masih bergantung pada dukungan anggaran dan kebijakan pemerintah. Temuan-temuan tersebut kemudian disintesis untuk mengidentifikasi bentuk tantangan yang paling sering muncul dalam implementasi kolaborasi penta helix pada program penanganan stunting.

Tahun	Prevalensi Stunting (%)
2021	24,4%
2022	21,6%
2023	21,5%
2024	19,8%

Tabel 1. Prevalensi Stunting di Indonesia Tahun 2021–2024

Sumber: Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024.

Pembahasan

Kolaborasi penta helix menjadi pendekatan yang relevan dalam penanganan stunting karena akar permasalahan stunting tidak berasal dari satu faktor tunggal. Kekurangan gizi pada anak sering berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga, kualitas sanitasi, tingkat pendidikan orang tua, akses layanan kesehatan, hingga pola pengasuhan dalam rumah tangga. Karakteristik permasalahan tersebut menempatkan stunting sebagai isu yang melibatkan banyak sektor sekaligus. Upaya penanganan yang hanya berfokus pada intervensi kesehatan cenderung menghasilkan dampak yang terbatas karena berbagai faktor penyebab lainnya tetap berlangsung di lingkungan masyarakat. Kebutuhan akan kerja sama lintas sektor muncul dari kenyataan bahwa

setiap aktor memiliki sumber daya dan kemampuan yang berbeda dalam menjawab persoalan stunting.

Dominasi pemerintah dalam pelaksanaan program stunting masih menjadi ciri utama pelaksanaan kolaborasi di Indonesia. Sebagian besar program dirancang, dikoordinasikan, dan diawasi oleh instansi pemerintah sehingga arah kebijakan sangat bergantung pada kapasitas birokrasi yang tersedia. Kondisi tersebut memberikan keuntungan berupa adanya kepastian regulasi dan dukungan anggaran yang jelas. Ruang partisipasi aktor lain sering berada pada posisi pendukung program yang telah ditetapkan sebelumnya. Situasi seperti ini menyebabkan potensi kolaborasi belum berkembang secara optimal karena kontribusi akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media belum sepenuhnya terlibat dalam proses pengambilan keputusan maupun perumusan strategi program.

Peran akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media memiliki nilai strategis yang tidak dapat digantikan oleh pemerintah. Akademisi menyediakan pengetahuan ilmiah yang membantu penyusunan program lebih tepat sasaran. Dunia usaha mampu memperluas dukungan melalui pembiayaan, inovasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Komunitas memiliki kedekatan sosial yang memudahkan proses pendampingan keluarga sasaran. Media berfungsi membangun kesadaran publik mengenai pentingnya pencegahan stunting sejak masa kehamilan hingga usia balita. Kolaborasi menjadi lebih kuat ketika seluruh aktor tidak hanya hadir sebagai pelengkap, melainkan terlibat aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.

Persoalan terbesar dalam implementasi penta helix terletak pada kemampuan menjaga hubungan kerja sama dalam jangka panjang. Perbedaan kepentingan organisasi, perubahan kebijakan, keterbatasan sumber daya, serta pergantian kepemimpinan sering memengaruhi keberlangsungan program yang telah dibangun. Kerja sama yang berjalan baik pada satu periode belum tentu bertahan pada periode berikutnya apabila tidak didukung oleh mekanisme koordinasi yang kuat. Kualitas komunikasi, kejelasan pembagian peran, dan komitmen bersama menjadi faktor yang menentukan keberhasilan kolaborasi. Penanganan stunting memerlukan proses yang berlangsung terus-menerus sehingga keberlanjutan hubungan antaraktor menjadi kebutuhan yang sama pentingnya dengan pelaksanaan program itu sendiri.

Kesimpulan

Stunting merupakan permasalahan multidimensional yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak dalam proses penanganannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa kolaborasi penta helix berkontribusi dalam memperkuat upaya penurunan stunting melalui sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media yang memiliki peran serta sumber daya yang saling melengkapi. Pemerintah berperan sebagai pengarah kebijakan dan koordinator program, sementara aktor lainnya mendukung melalui penyediaan pengetahuan, sumber daya, pemberdayaan masyarakat, serta penyebaran informasi. Efektivitas kolaborasi dipengaruhi oleh kualitas koordinasi, komunikasi, pembagian peran, dan komitmen bersama antaraktor. Sejumlah tantangan masih ditemukan, terutama terkait ketimpangan keterlibatan aktor, keterbatasan koordinasi lintas sektor, serta keberlanjutan kerja sama dalam jangka panjang. Penguatan sinergi dan optimalisasi peran setiap aktor penta helix menjadi langkah penting untuk mendukung percepatan penurunan stunting dan mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang lebih berkualitas di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Akollo, B., Ohoiwutun, S. K., & Selanno, H. (2026). Strategi pencegahan dan penanganan stunting dengan pendekatan pentahelix berbantuan analysis hierarchy process di Kecamatan Seram Barat. *FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 24(1).
- Catarina, D. P., & Afriyanti, A. (2024). Sinergi pentahelix dalam penanganan stunting di Kabupaten Gunungkidul dalam dimensi profil pelajar Pancasila. *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(1), 77-83.
- Catarina, D. P., Afriyanti, A., Rohmah, S., & Bawono, T. S. E. (n.d.). Sinergi pentahelix penanganan stunting di Kabupaten Gunungkidul dalam dimensi profil pelajar Pancasila. *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(1).
- Driatama, D. A. (2024). Tata kelola kolaborasi melalui Segoro Bening dan Ceting Buhari dalam penanganan kasus stunting di Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 14(2), 212-224.
- Febriana, N., & Hertati, D. (2023). Penanggulangan stunting dalam perspektif collaborative governance. *Public Policy: Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis*, 4(2), 625-644.
- Harahap, U. I., & Yanti, E. (2025). Pendekatan penta helix berbasis kearifan lokal terhadap peningkatan penggunaan tablet tambah darah (TTD) sebagai pencegahan stunting di Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal Ilmiah Kebidanan Imelda*, 11(2), 108-115.
- Irawan, A., Suwandewi, A., & Wulandatika, D. (2023). Pendekatan budaya melalui program pengelolaan anak stunting dan pemberian makanan tambahan dengan pendekatan penta helix di Kabupaten Banjar. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 6(1), 157-175.

- Kusuma, I. R., Riani, E. N., & Wibowo, U. D. A. (2024). Peningkatan peran pentahelix bagi kader 'Aisyiyah untuk pencegahan stunting di Banyumas. *Adimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2), 129-136.
- Melia, Y. (2023). Manajemen pemerintahan dalam upaya mencegah stunting di Kota Bandung. *Journal of Mandalika Social Science*, 1(1), 53-60.
- Nurlatif, R. V. N., & Priharwanti, A. (2019). Stunting: Besaran masalah dan strategi pencegahannya di Kabupaten Pekalongan. *E-Jurnal Kajen*, 3(2), 69-82.
- Oktaviyanti, A., Taufiq, A., & Suhindarno, H. (2024). Collaborative governance in efforts to reduce stunting in Bojonegoro Regency. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(2), 481-493.
- Pardosi, R. B., & Bratakusumah, D. S. (2024). Analisis penerapan collaborative governance pada penurunan tengkes/stunting: Systematic literature review. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 10(2), 228-246.
- Purnomo, D., Herwandito, S., Waruwu, K. J. I. M., Renyoet, B. S., & Mangalik, G. (2023). Optimalisasi multi-pihak untuk percepatan penurunan stunting di Kota Salatiga dalam peluang dan tantangan. *Visi Sosial Humaniora*, 4(2), 81-98.
- Saepudin, D. Y., Muksin, N. N., Nugraha, I., & Adimiharja, R. (2025). Implementasi kebijakan penurunan stunting di Kota Sukabumi. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 8(1), 135-148.
- Sahara, F., Tehubijuluw, Z., & Elake, N. (2025). Strategi implementasi kebijakan penanganan stunting di era efisiensi anggaran dengan pendekatan pentahelix pada Badan Perencanaan Kabupaten Seram Bagian Barat. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(3), 1840-1857.
- Toana, A. A., & Rowa, H. (2024). Model partisipasi penta helix dalam penanganan stunting di Kota Depok: Hambatan, strategi, dan tantangan penguatan kesejahteraan sosial. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(4), 2145-2158.